



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I - 2025

**BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN**

Tim Penyusun

Kepala BRPPUPP

Kepala Subbagian Umum / Ketua Tim Kerja Manajerial

Ketua Tim Kerja Penyuluhan

Acim Tirtana, SE

Lisnawati, SE

Rian Ariadi Harahap, S.AP

Muthia Nurlestari Putri, S.Pi

Arismansyah, S.Pi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025. LKjIP BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025 disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN - RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban BRPPUPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah- langkah pelaksanaan kebijakan kegiatan manajerial dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil- hasil penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak- pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Palembang, 21 April 2025

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan



Rezki Antoni S, S.Kel

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan	3
1.3 Tugas dan Fungsi	3
1.4 Keragaan SDM BRPPUPP	5
1.5 Sistematika Laporan Kerja	6
1.6 Potensi dan Permasalahan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Rencana Kerja Tahunan	18
2.3 Perjanjian Kinerja	19
2.4 Pengukuran Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	22
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	22
3.3 Akuntabilitas Keuangan	44
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025.....	49
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Capaian Kinerja Utama	52
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi.....	54
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Output dan pagu anggaran 2025.....	18
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusluh KP.....	19
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025	23
Tabel 4. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok).....	24
Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) Triwulan I Tahun 2025 dengan Satminkal Lain.....	25
Tabel 6. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	26
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh	27
Tabel 8. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	28
Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	28
Tabel 10. Capaian IKU Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Miliar).....	30
Tabel 11. Rincian PNBP dari Surat Penyampaian PNBP BPPSDM KP	30
Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU Nilai PNBP Satker BRPPUPP dengan Satminkal Lain	31
Tabel 13. Capaian IKU Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang mendapatkan pendampingan di BRPPUPP (Unit).....	32
Tabel 14. Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	33
Tabel 15. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang).....	34
Tabel 16. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang).....	34
Tabel 17. Capaian IKU Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)..	35
Tabel 18. Capaian IKU Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit).....	35
Tabel 19. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen).....	36
Tabel 20. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%)	37
Tabel 21. Perbandingan Capaian Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Satminkal Lain.....	37
Tabel 22. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (nilai)	38
Tabel 23. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai).....	39
Tabel 24. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	40
Tabel 25. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)	41
Tabel 26. Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	42
Tabel 27. Perbandingan Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP dengan satminkal lain	42
Tabel 28. Realisasi Anggaran BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025	44
Tabel 29. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Per IKU.....	46

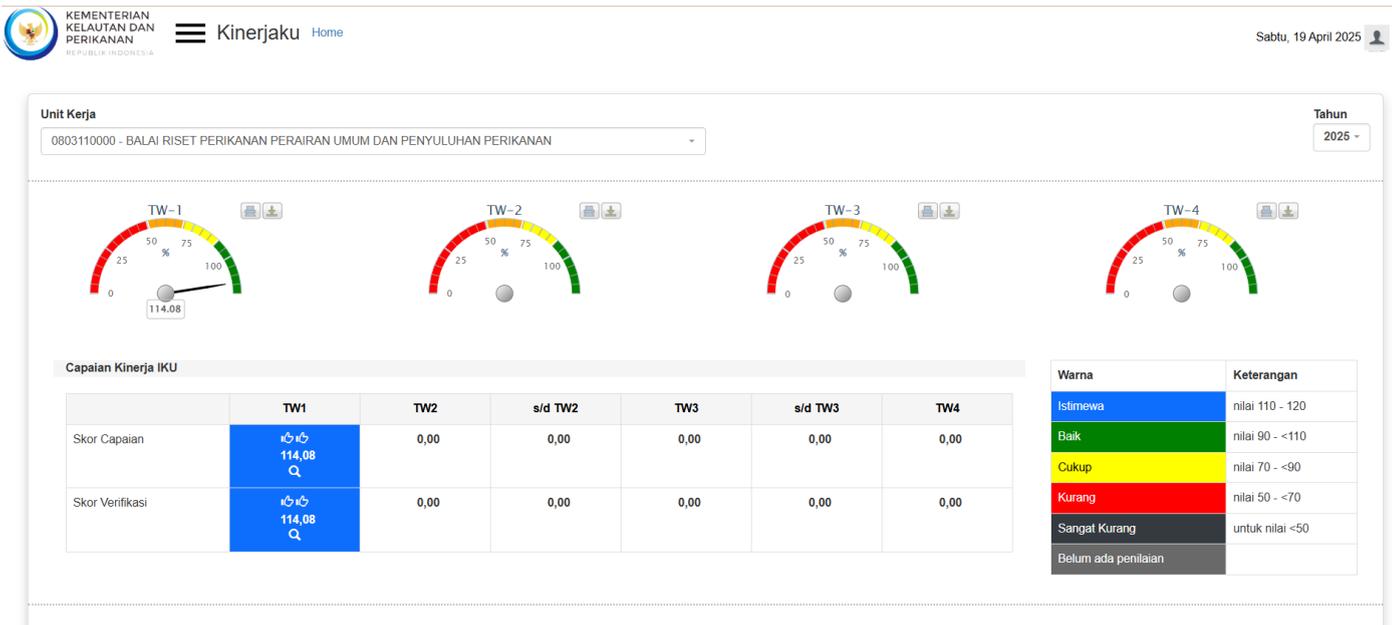
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP	4
Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Tahun 2025.....	5
Gambar 3. Sasaran Kegiatan BRPPUPP tahun 2025	17
Gambar 4. Dashboard Kinerja Triwulan I Tahun 2025 BRPPUPP.....	22
Gambar 5. Dashboard Kinerja Triwulan I Tahun 2025 BRPPUPP	52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPPSDM KP 2020-2024, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-1 yaitu merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten.

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Triwulan I TA 2025 sebesar **114,08%**, sebagaimana dashboard kinerja sebagai berikut:



Sumber: Dashboard Aplikasi Kinerja BRPPUPP

Pada Triwulan I dari 18 IKU di Tahun 2025 terdapat 7 IKU BRPPUPP yang telah mencapai target sehingga berstatus biru dan hijau, IKU yang telah ada capaiannya adalah:

1. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) dengan capaian di Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 110 Kelompok dengan target sebanyak 100 Kelompok dengan persentase sebesar 110%
2. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 1 kelompok dari target triwulan I tahun 2025 sebanyak 1

kelompok dengan persentase sebesar 100%.

3. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai 12 kelompok dari target triwulan I Tahun 2025 sebanyak 10 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
4. Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar) tercapai 0,03 dari target triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,01 dengan persentase sebesar 120%.
5. Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit) tercapai sebanyak 5 Unit dengan target 5 Unit dan persentase sebesar 100%
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target sebesar 85% dengan persentase capaian 117,65%
7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 80% dengan persentase capaian 120%

Capaian Indikator Kinerja Utama BRPPUPP Triwulan I TA. 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TRIWULAN I TA. 2025		%
				TARGET	CAPAIAN	
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	100	110	110
		2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	1	1	100
		3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	10	12	120
		4	Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	0,01	0,03	120
		5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit)	5	5	100
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)			
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)			
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)			
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	9	Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)			
		10	Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit)			
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)			
		12	Persentase Unit Kerja BRPPUPPP yang Menerapkan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85	100	117,65
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)			
		14	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)			
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)			
		16	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)			
		17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80	100	120
		18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)			

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I tahun 2025

Secara umum kinerja BRPPUPP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Belum terbitnya nomenklatur organisasi dan tata kerja BRPPUPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP.
2. BRPPUPP sudah melakukan reviu renstra pada tahun 2024 namun belum disertai dengan perbaikan target kinerja tahun 2025 sesuai kebijakan perencanaan. Sehingga pada pembahasan perbandingan indikator kinerja tahunan dengan indikator kinerja jangka menengah masih membandingkan dengan target yang sebelumnya.
3. Dalam pencapaian IKU Penyuluhan masih banyak kendala seperti kurangnya jumlah penyuluh jika dibandingkan dengan target jumlah pelaku utama yang akan disuluh, penyusunan Profil Kelompok yang dibuat masih ada yang belum sesuai dengan format dan tidak sesuai dengan kondisi update.
4. Proses pencapaian IKU Kelompok yang ditingkatkan kelas cenderung membutuhkan waktu yang tidak singkat dan proses yang panjang karena melibatkan banyak pihak .

Secara umum Kinerja BRPPUPP Triwulan I pada tahun 2025 berjalan dengan baik, namun demikian untuk memastikan capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal pada triwulan berikutnya perlu dilakukan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM KP maupun Pusat terkait informasi nomenklatur organisasi, tata kerja, serta tugas pokok dan fungsi balai yang baru, dan menyampaikan progresnya di internal BRPPUPP secara berkala melalui kegiatan apel pagi maupun kegiatan koordinasi lainnya.
2. Melakukan reviu renstra dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan kebijakan terkait perubahan target perjanjian kinerja di tahun 2025.
3. Menerapkan komitmen Bersama dalam pemenuhan target pencapaian IKU dengan dialog kinerja antara satminkal dan penyuluh perikanan agar profil kelompok yang disampaikan sesuai dengan format di perka BPPSDM dan sesuai batas waktu penyampaian
4. Menginventarisir calon kelompok yang akan ditingkatkan serta pengembangan Kompetensi dan Mindset Kelompok supaya lebih mandiri

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRPPUPP, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkup BRPPUPP. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah BRPPUPP ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 23.684.955.000,- atau 31,25% dari pagu anggaran Rp. 75.788.129.000,-

BAB I

PENDAHULUAN

01

LATAR BELAKANG

02

TUJUAN

03

TUGAS DAN FUNGSI

04

KERAGAAN SDM BRPPUPP

05

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

06

POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan ke-empat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) tahun 2020-2024, di mana keduanya mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi KKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BPPSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BPPSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM.

Penyusunan Rencana Strategis BRPPUPP dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur pembentukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) dan didalamnya juga mengatur tentang pembentukan Pusat Riset Perikanan dan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

BRPPUPP telah berdiri sejak tahun 1969, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas BRPPUPP adalah melaksanakan kegiatan maju dan penyuluhan di 5 (lima) provinsi yaitu provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung dengan jumlah penyuluh sebanyak 467 orang. Pelaksanaan riset meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjiran, ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan. Kegiatan riset dan penyuluhan BRPPUPP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP.176/MEN/KU.611/2017

tanggal 22 Desember 2016.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BRPPUPP ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2025.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPPUPP untuk meningkatkan Kinerjanya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 73/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Perikanan. Institusi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Penyuluhan Perikanan yang meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugasnya, BRPPUPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset perikanan perairan umum dan penyuluh perikanan;
2. Pelaksanaan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset Perikanan Perairan Umum Daratan;
4. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
6. Pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
8. Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

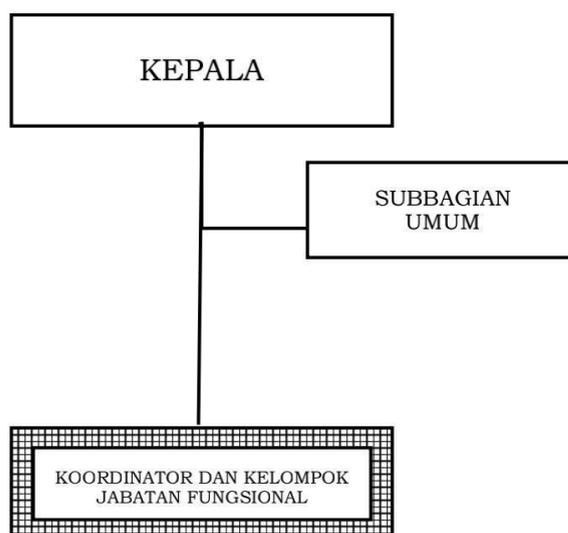
Keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP perlu dievaluasi, sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pasal 3, yaitu penyelenggaraan negara harus mengacu kepada azas proporsionalitas, profesional dan akuntabilitas.

Struktur organisasi BRPPUPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian umum dan kelompok fungsional, namun saat ini pasca penyetaraan jabatan struktural ke fungsional masih terdapat Subkoordinator dan Pelaksana yang sebelumnya merupakan pejabat struktural eselon IV dan V yaitu:

Subkoordinator Tata Usaha, Subkoordinator Tata Operasional, dan Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana, serta Subkoordinator Penyuluhan. Subkoordinator Tata Usaha terdiri atas Pelaksana Urusan Keuangan dan Umum dan Pelaksana Urusan Kepegawaian, Subkoordinator Tata Operasional terdiri dari Pelaksana urusan Program dan Anggaran dan Pelaksana Monitoring dan Evaluasi, Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana terdiri atas Pelaksana Urusan Pelayanan Teknis dan Pelaksana Urusan Prasarana dan Sarana, dan Subkoordinator Penyuluhan terdiri atas Pelaksana urusan Kelembagaan Kelompok dan Pelaksana urusan Penyelenggaraan

Struktur organisasi BRPPUPP tersaji dalam gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP

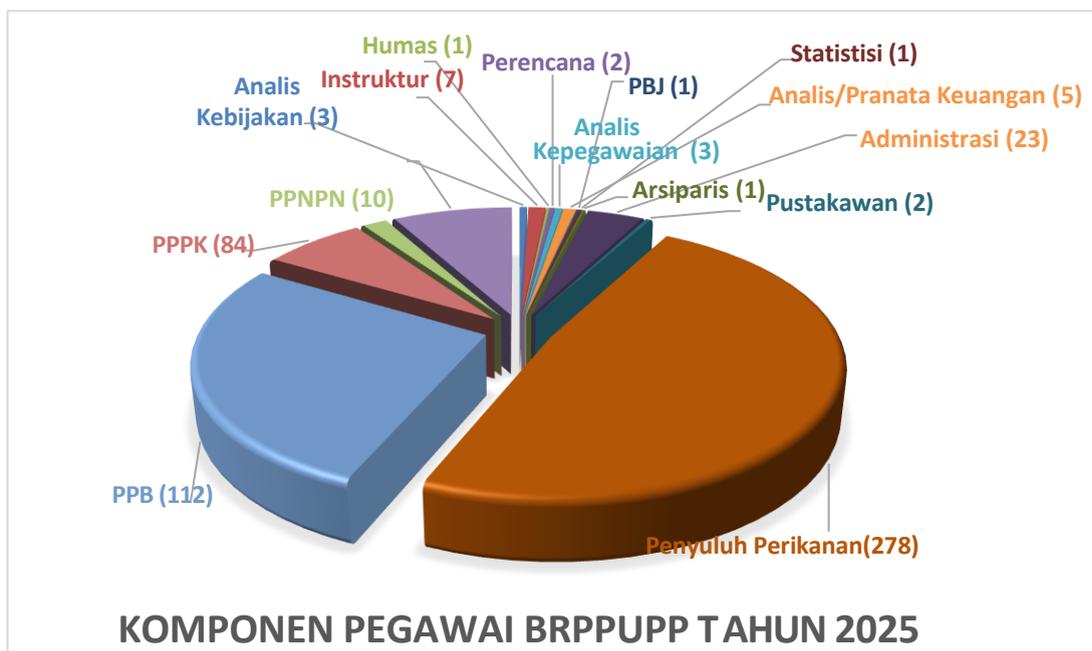
Berdasarkan Surat Tugas Nomor B. 833/BRSDM-BRPPUPP/KP.440/VIII/2023, Kepala BRPPUPP dibantu oleh 2 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Manajerial dan Tim Kerja Penyuluhan untuk mewujudkan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan uraian fungsi dan tugas sebagai berikut :

1. Rincian pelaksanaan kegiatan manajerial dan penyuluhan tersusun rapi
2. Peran anggota Tim Kerja terbagi sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan
3. Kegiatan sesuai dengan perencanaan
4. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota Tim Kerja
5. Tersusunnya hasil kinerja anggota timnya kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan
6. Terlaksananya kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antara anggota Tim Kerja

1.4 Keragaan SDM BRPPUPP

BRPPUPP Palembang dikepalai oleh seorang Kepala Balai (Eselon III), 1 Kasubbag Umum. Saat ini BRPPUPP didukung oleh 584 Pegawai terdiri atas terdiri atas 3 orang Analis Kebijakan, 7 orang Instruktur, 1 orang Humas, 2 orang Perencanaan, 3 orang Analis Kepegawaian, 5 orang Analis/Pranata Keuangan, 1 orang PBJ, 1 orang Statistisi, 1 orang Arsiparis, 23 orang tenaga Administrasi, 2 orang Pustakawan, 278 orang Penyuluh Perikanan, 112 orang Penyuluh Perikanan Bantu, P3K Penyuluh 84 Orang, 10 orang tenaga PPNPN.

Jumlah pegawai BRPPUPP tersaji dalam grafik dibawah ini:



Sumber: Data Keragaan Pegawai BRPPUPP Tahun 2025

Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Tahun 2025

1.5 Sistematika Laporan Kerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama triwulan I Tahun 2025.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BRPPUPP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPSDM
3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis BRPPUPP 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BRPPUPP Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja triwulan I Tahun 2025.
4. Bab IV Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.

1.6 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan sektor usaha perikanan, sentra pendaratan hasil perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Sementara itu nilai produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari nilai produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Produksi perikanan tangkap diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dalam rangka pemenuhan protein hewani sebagai sumber gizi masyarakat yang berkualitas. Untuk komoditas tertentu juga mendukung peningkatan devisa negara melalui ekspor.

Total data produksi yang disajikan dalam kerangka laporan produksi perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari data perolehan survei dan estimasi Dirjen Perikanan Tangkap. Hasil menggambarkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena dominasi data masih merupakan kontribusi besar sektor tangkap perikanan laut. Kenaikan volume produksi perikanan tangkap periode 2010-2014 rata-rata sebesar 4,52% per tahun,

yaitu 5.384.418 ton pada tahun 2010 menjadi 6.200.180 ton pada tahun 2014. Produksi tetap didominasi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 5.779.990 (93,22%) sedangkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan sebesar 420.190 (7,27%).

Sementara itu, capaian nilai produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar Rp 108,53 triliun, terdiri dari nilai produksi perikanan tangkap di laut sebesar Rp 99,90 triliun dan perairan umum daratan sebesar Rp 8,62 triliun. Nilai produksi perikanan tangkap selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,60% per tahun. Kenaikan terbesar disumbangkan dari perikanan tangkap di perairan laut.

Terus meningkatnya hasil produksi tangkap sektor perikanan pedalaman/ perairan umum dengan rata-rata 9,52% pertahun menjadi perhatian khusus. Di mana perikanan perairan umum sangat tergantung dengan wilayah tangkap yang juga digunakan untuk banyak kepentingan. Kegiatan penangkapan lestari yang berbasis dengan kelestarian sumberdaya ikan menjadi konsen penting dalam keberlanjutan perikanan perairan umum itu sendiri.

Keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2017 terdapat 5.783 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 2.500 orang Penyuluh Perikanan bantu, 3.283 orang penyuluh PNS, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat. Terhitung mulai 01 Januari 2018 penyuluh perikanan secara administrasi dibagi menjadi 9 Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) yang tersebar di Indonesia.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN, dengan demikian fungsi BRPPUPP di bidang riset perikanan perairan umum daratan hilang dan berfokus di kegiatan manajerial dan Penyuluhan Perikanan.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset dan penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum terbitnya nomenklatur organisasi dan tata kerja BRPPUPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP.
- 2) BRPPUPP sudah melakukan reviu renstra pada tahun 2023 namun belum disertai dengan perbaikan target kinerja tahun 2024 dan 2025 sesuai kebijakan perencanaan. Sehingga pada pembahasan perbandingan indikator kinerja tahunan dengan indikator kinerja jangka menengah masih membandingkan dengan target yang sebelumnya.
- 3) Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BRPPUPP akan mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi.
- 4) Jumlah sebaran dan kompetensi penyuluh perikanan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan di lapang;
- 5) Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- 6) Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:
 - i. Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh;
 - ii. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya; Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
 - iii. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;
 - iv. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
 - v. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan, antara lain:

- i. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- ii. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;

- iii. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai;
- iv. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
- v. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- vi. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- vii. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;
- viii. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

01

RENCANA STRATEGIS

02

RENCANA KERJA TAHUNAN

03

PERJANJIAN KINERJA

04

PENGUKURAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, salah satunya adalah perairan umum daratan. Perairan umum di Indonesia tercatat seluas 54 juta ha, terdiri dari 12 juta ha sungai dan rawa, 2,1 juta ha danau (alami dan buatan), dan 39,9 juta ha perairan rawa pasang surut. Perairan umum mempunyai posisi strategis dan berfungsi serba guna, selain dimanfaatkan oleh sektor perikanan juga dimanfaatkan oleh sektor Pekerjaan Umum, perindustrian, pertambangan, kehutanan, pertanian, pariwisata, transmigrasi, perhubungan dan pemukiman (Ilyas *et al*, 1990).

Perairan umum daratan terdiri dari sungai, rawa (rawa banjiran, rawa gambut dan rawa pasang surut), estuaria, danau dan waduk serta genangan air lainnya. Sungai merupakan perairan yang mengalir (*lotic water*), memiliki karakteristik mengalir searah dari hulu ke hilir, aliran bagian hulu lebih deras dari pada yang hilir (Ewusie, 1990; Odum, 1993). Sungai-sungai besar banyak tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Keanekaragaman ikan di sungai cukup tinggi sebagai contoh di DAS Kapuas telah ditemukan lebih dari 300 jenis ikan, di DAS Barito lebih dari 110 jenis, sedangkan di DAS Musi lebih dari 200 jenis (Dudley, 1996; Husnah *et al.*, 2008). Tiap tipe ekosistem sungai bagian hulu, tengah dan hilir mempunyai jenis ikan yang khas. Jenis ikan khas di hulu sungai (*up-stream*) sebagai contoh ikan Semah (*Tor douronensis*), bagian tengah (*middle-stream*) yaitu ikan Belida (*Chitala lopis*), dan bagian hilir (*lower-stream*) yaitu Sembilang (*Paraplotosus albilabris*) (Utomo, *et al* 2007). Keanekaragaman jenis ikan penghuni sungai cukup tinggi, namun belum ada data yang akurat untuk mengungkapkan hal ini karena penelitian masih bersifat spasial.

Setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 2005-2009, pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada RPJMN II 2010-2014 semakin menjadi arus utama. Demikian pula dengan sub sektor perikanan tangkap di dalamnya, baik itu perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum daratan (PUD). Pelaksanaan pengarusutamaan tersebut mengacu kepada tema RPJMN II sebagaimana telah tercantum dalam RPJPN 2005-2025, yakni “memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, dan memperkuat daya saing perekonomian”. Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RPJMN dimaksud menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), dan diadopsi menjadi Renstra Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyuluh perikanan yang semula merupakan pegawai daerah dan terhitung bulan Juli 2017 telah dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat sebanyak 3.216 orang. Dan BRPPUPP Palembang memiliki penyuluh perikanan sebanyak 474 orang yang tersebar di 5 Provinsi yaitu

Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BRPPUPP akan mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi. Sampai Triwulan I, KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BRPPUPP masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 73/PERMEN-KP/2020. Namun demikian telah dilakukan penyesuaian dan review Renstra BRPPUPP yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BRPPUPP.

1. Visi

Dalam mendukung terwujudnya cita-cita nasional dengan kuatnya ketahanan pangan, tingkat kesejahteraan yang meningkat dari masyarakat diperlukan pembangunan fundamental berdasarkan kajian yang terukur dan dapat di implementasikan *stakeholder* perikanan. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagai salah satu instansi pelaksana dalam pengkajian sumberdaya dan pemanfaatan perikanan khususnya wilayah daratan bertanggung jawab secara langsung guna memberikan kajian, analisa, data, dan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya dalam pembangunan perikanan daratan. Visi BRPPUPP Berdasarkan Visi pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Selain itu juga mengacu visi Presiden 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dari visi Presiden kemudian ditetapkan visi KKP 2020-2024 untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden. Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Selanjutnya BPPSDM KP untuk mendukung visi KKP menetapkan visi BPPSDM KP 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi Pusat Penyuluhan KP adalah “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong melalui riset dan inovasi iptek perikanan”.

Visi Pusluh KP pada tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan SDM KP kompeten untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Adapun keinginan tersebut dituangkan dalam visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan sebagai berikut: “Mewujudkan Sains Dan Teknologi

Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan untuk Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kelestarian dan Pemanfaatan yang Berkesinambungan”

2. Misi

Dalam pencapaian Visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian potensi sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- b. Melakukan penelitian kegiatan perikanan tangkap di perairan umum daratan;
- c. Melakukan penelitian bio-ekologi ikan di perairan umum daratan;
- d. Meningkatkan pemanfaatan praktis hasil penelitian melalui diseminasi, simposium dan workshop kepada stakeholder;
- e. Menyebarkan informasi dan teknologi hasil penelitian dalam berbagai bentuk publikasi ilmiah dan semi ilmiah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694). BRPPUPP memiliki tugas Melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, dengan fungsi /uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset perikanan perairan umum dan penyuluh perikanan;
- b. Pelaksanaan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjiran, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset Perikanan Perairan Umum Daratan;
- d. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

3. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi BRPPUPP yang telah dijelaskan tersebut diatas bertujuan untuk:

- a. Melestarikan Sumber plasma nuftah perikanan di perairan umum daratan
- b. Melestarikan dan memelihara kesehatan lingkungan ekosistem perairan umum daratan
- c. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan
- d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan di perairan umum daratan
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM untuk melakukan riset.
- f. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana riset
- f. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan

4. Sasaran Strategis

Renstra BRPPUPP Tahun 2020 - 2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BRPPUPP sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda *Logical Framework*.

Pada tahun 2025 ini, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memiliki 5 (lima) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebagai bentuk dukungan untuk mencapai Sasaran Strategis pada Level 0 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sasaran Program pada Level 1 BPPSDM, serta Sasaran Kegiatan pada Level 2 Pusat Penyuluhan KP. Dari 8 (delapan) Sasaran Strategis pada Level 0 KKP dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja, BRPPUPP mendukung 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja, sebagai berikut :

1. SS3. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat

IK7. Nilai PNBK Sektor KP

2. SS8. Reformasi birokrasi KKP yang berkualitas

IK17. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP

IK18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP

Sedangkan dari 7 (tujuh) Sasaran Program dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Program pada Level 1 BPPSDM, BRPPUPP mendukung 4 (empat) Sasaran Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program, yaitu :

1. IKP2. Nilai PNBK BPPSDM

2. SP3. Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk

IKP4. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Disuluh

IKP5. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya

IKP6. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk

3. SP7.Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPSDM

IKP12. Batas Tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BPPSDM TA.2024

IKP13. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM

IKP14. Nilai PM SAKIP BPPSDM

IKP17. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPSDM

IK19. Nilai IKPA lingkup BPPSDM

IK20. Nilai NKPA lingkup BPPSDM

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mendukung Sasaran Kegiatan pada Level 2 Pusat Penyuluhan KP sebagai berikut :

1. Pusat Penyuluhan KP

Dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Kegiatan, BRPPUPP mendukung 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

SK5. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK9. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh

IKK10. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya

IKK11. Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk

Selanjutnya, BRPPUPP mendukung Sasaran Strategis Level 0, Sasaran Program Level 1, dan Sasaran Kegiatan Level 2 pada tahun 2025, melalui Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut.

SK1.Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK1. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang disuluh di BRPPUPP dengan target pada tahun 2024 sejumlah 5.600 kelompok menjadi 4.048 kelompok pada tahun 2025

IKK2. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang ditingkatkan kelasnya di BRPPUPP pada tahun 2024 terdapat target sebanyak 223 menjadi 149 kelompok pada tahun 2025

IKK3. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang dibentuk di BRPPUPP pada tahun 2024 terdapat target 530 Kelompok dan menjadi 453 kelompok pada tahun 2025

IKK4. Nilai PNBK BRPPUPP ditahun 2024 dengan target sebesar Rp 40.000.000,- dan di Tahun 2025 dengan target sebesar 0,0412 Rupiah Milyar

SK3.Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK7. Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BRPPUPP pada tahun 2024 tidak

terdapat target, namun pada tahun 2025 terdapat target sebanyak 1 Unit.

IKK8. Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BRPPUPP pada tahun 2024 tidak terdapat target, namun pada tahun 2025 terdapat target 1 Unit.

SK4. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

IKK9. Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP pada tahun 2024 memiliki target 81 dan pada tahun 2025 masih tetap 81

IKK10. Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2023 dengan target nilai 76 dan ditahun 2024 terdapat target sebesar 81 serta target ditahun 2025 yaitu 80.

IKK11. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2023 dengan target nilai 80 sehingga tidak terdapat target pada tahun 2020 dan ditahun 2025 terdapat target sebesar 85.

IKK12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP pada tahun 2020 memiliki target 88 dan menjadi 93,76 pada tahun 2024 dan target ditahun 2025 yaitu 92.

IKK13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP pada tahun 2020 memiliki target 85 dan menjadi 71 pada tahun 2024 dan ditahun 2025 menjadi 71,50

IKK14. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPUPP merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2023 dengan target 3 kemitraan, sehingga tidak terdapat target pada tahun 2020 dan tahun 2025 terdapat target sebanyak 1 kemitraan BRPPUPP.



Gambar 3. Sasaran Kegiatan BRPPUPP tahun 2025

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRPPUPP Tahun 2025 menetapkan 2 program yaitu Pendidikan dan pelatihan vokasi, Riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran Rp. 75.788.129.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Output dan pagu anggaran 2025

No	OUTPUT	ANGGARAN
1	PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.016.052.000
	Penyuluh perikanan yang bersertifikat kompetensi	14.000.000
	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan	2.927.052.000
	Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan KP	25.000.000
	Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	72.241.324.000
	Layanan BMN	11.000.0000
	Layanan Hubungan Masyarakat	14.000.000
	Layanan Umum	32.000.000
	Layanan Data dan Informasi	6.000.000
	Layanan Perkantoran	72.091.324.000
	Layanan Manajemen SDM	16.000.000
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	25.000.000
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	21.000.000
	Layanan Manajemen Keuangan	15.000.000
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	10.000.000	
TOTAL		75.257.376.000

Sumber: Program Anggaran BRPPUPP

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja BRPPUPP Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala BRPPUPP dengan Eselon II terkait, yaitu Kepala Pusat Penyuluhan KP yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja (IK) dan target.

A. Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusat Penyuluhan KP

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusat Penyuluhan KP memiliki 5 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRPPUPP dengan Pusluh KP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	4.048
		2 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	149
		3 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	453
		4 Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	0,0412
		5 Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit)	28
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6 Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7 Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	14
		8 Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	10
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	9 Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)	1
		10 Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit)	1
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)	1
		12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	92
		14 Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	80
		15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	71,5
		16 Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	81
		17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80
		18 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	80

2.4 Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BRPUPP Triwulan I Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRPPUPP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BRPPUPP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Perintah Kepala BRPPUPP NOMOR : B.134/BRPPUPP/TU.110/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala BRPPUPP. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, seksi Tata Operasional BRPPUPP merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

01

PRESTASI INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2024

02

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

03

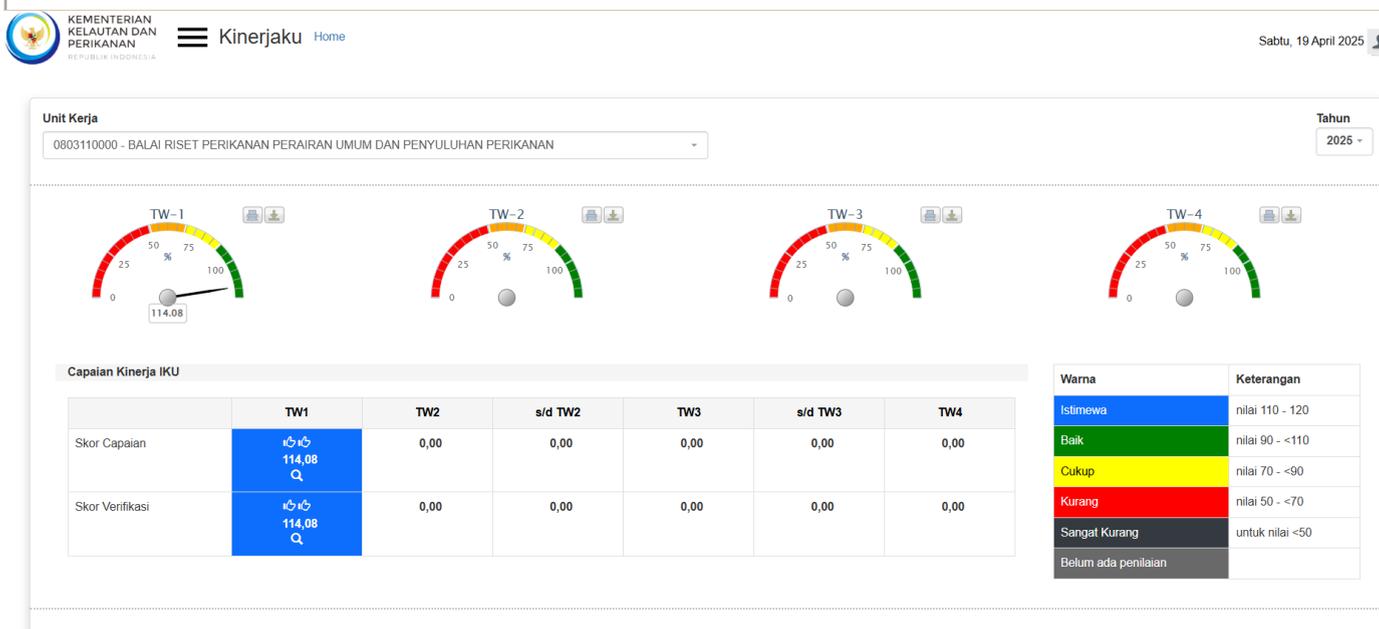
AKUNTABILITAS KEUANGAN

04

EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA
BRPPUPP TRIWULAN I TAHUN 2024

3.1 Prestasi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2025 sebesar **114,08%** per 19 April 2025, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerja Triwulan I Tahun 2025 BRPPUPP.

Selama triwulan I, dari target 18 IKU BRPPUPP terdapat 7 IKU yang telah mencapai target di triwulan I Tahun 2025, sehingga memperoleh status hijau dan biru.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPPUPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BRPPUPP yang menjadi kontrak kinerja pada triwulan I Tahun 2025 dapat tercapai.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TRIWULAN I TA. 2025		%
				TARGET	CAPAIAN	
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	100	110	110
		2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	1	1	100
		3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	10	12	120
		4	Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	0,01	0,03	120
		5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit)	5	5	100
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)			
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)			
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)			
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	9	Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)			
		10	Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit)			
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)			
		12	Persentase Unit Kerja BRPPUPPP yang Menerapkan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85	100	117,65
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)			
		14	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)			
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)			
		16	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)			
		17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80	100	120
		18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)			

Sumber: Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN 1 :**Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan****Indikator Kinerja 1**

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh dan dibentuk pada tahun 2024 oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pendampingan akses modal, pendampingan akses perizinan berusaha dan pendampingan manajemen usaha kelompok. Pelaksanaan pendampingan sesuai penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPPSDMKP/ Surat Kepala Pusat Penyuluhan KP tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Adapun cara pengukuran untuk IKU ini yaitu Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang disuluh disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil.

Tabel 4. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)

Realisasi Triwulan I Tahun				Tahun 2024				RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
5.888	2.671	991	1.110	100	110	110	- 90,1	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada triwulan I 2025 capaian indikator kinerja ini telah mencapai persentase sebesar 110% dari target yang ditetapkan. Realisasi yang didapat adalah sebesar 110 kelompok dengan target ditriwulan I 2025 sebanyak 100 kelompok. Pada triwulan I tahun 2024 indikator ini telah tercapai sebesar 1.110 kelompok. Dilihat dari jumlah realisasi dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi pada terdapat penurunan capaian 2024 - 2025 sebesar 90,1% namun realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang ditetapkan. Apabila dilihat dari Tahun 2020 sampai 2024 untuk Target IKU ini selalu berubah-ubah.

Perolehan capaian indikator kinerja yang melebihi target ini dapat dikarenakan kinerja penyuluh perikanan SATMINKAL BRPPUPP sangat baik dan mengalami peningkatan kinerja ditriwulan I tahun 2025.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang disuluh di BRPPUPP dapat melampaui target antara lain adalah :

1. Penyuluh perikanan memiliki tugas pokok yaitu melakukan penyuluhan kelompok dan harus dituangkan di SKP, sehingga seluruh Penyuluh harus mencapai targetnya;
2. Terbitnya Peraturan Kepala BPPSDM KP No. 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan P3K, dan Penyuluh Perikanan Bantu
3. yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas serta target yang harus dicapai oleh penyuluh;
4. Profil Kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang disuluh disusun dan diperbarui sebagai data dukung indikator kinerja Kelompok Pelaku usahan/Pelaku pendukung yang Disuluh.

Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 289.800.000 (41,65%) dengan pagu Rp 695.701.000,25

Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh di Satker BRPPUPP (Kelompok) ini jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Satminkal lain lingkup Pusluh KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) Triwulan I Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100	110	110
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	150	180	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	50	53	106
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	100	120	120

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu mencapai persentase 110%. Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penyuluhan bukan saja berperan dalam kegiatan prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan, akan tetapi juga berintegrasi dengan fungsi pendampingan yang secara terus menerus sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha kelautan dan perikanan yang akhirnya meningkatkan produktivitas usahanya.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 695.701.000,25 dan telah terealisasi sebesar Rp 289.800.000 (41,65%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 110% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 68,35%.

Indikator Kinerja 2

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)

Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluh Kelautan dan Perikanan, dengan kriteria sesuai Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/ sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.

Adapun pengukuran untuk IKU ini yaitu menghitung Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan kelasnya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke utama) dari Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan kelasnya yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 6. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
1	0	2	6	1	1	100	-83,34	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator ini pada triwulan I Tahun 2025 telah mendapat realisasi sebanyak 1 kelompok dari target yang ditetapkan yaitu 1 kelompok, sehingga persentase capaian untuk indikator ini sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi pada periode yang sama di tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 83,34% di 2025, dimana tahun 2024 indikator ini mencapai realisasi 6 kelompok. Penurunan ini dapat diakibatkan belum semua kelompok bisa menumbuhkan kelompok di daerah binaannya, atau masih dalam proses kelengkapan administrasi sehingga belum dapat dijadikan capaian IKU.

Perolehan nilai capaian indikator berikut dapat dikarenakan penyuluh SATMINKAL BRPPUPP telah menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kelas kelompok kelautan dan perikanan yang mereka bina, sehingga capaian pada indikator berikut dapat mencapai target.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) pada triwulan I Tahun 2025 dapat mencapai target antara lain adalah telah dilakukannya pendampingan kelompok oleh Penyuluh perikanan serta melakukan penilaian kelas terhadap kelompok binaannya untuk mencapai target kinerja sesuai jabatan dan merupakan IKU utama penyuluh yang nantinya dituangkan di SKP.

Kelompok yang telah dilakukan penilaian telah memenuhi kriteria untuk dapat dinaikkan kelasnya sesuai dengan Kepmen KP No.14 Tahun 2012 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan
- b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusluh KP,
- c) Pelaporan online dokumen capaian kinerja Penyuluh Perikanan, dan SKP Penyuluh Perikanan beserta data dukungnya,
- d) Evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	2	2	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP mencapai target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya mencapai 100%.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 695.701.000,25 dan telah terealisasi sebesar Rp 289.800.000 (41,65%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 58,35%.

Indikator Kinerja 3

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan dibentuk pada tahun berjalan, dengan kriteria pembentukan kelompok berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Adapun cara pengukuran IKU ini yaitu Hitung Jumlah kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang dibentuk dan memenuhi kriteria pembentukkan kelompok dan Jumlah kelompok Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuran diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 8. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)

Realisasi TW I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
406	195	128	131	10	12	120	9,16	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Berdasarkan tabel diatas pada triwulan I Tahun 2025 capaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 12 kelompok dari target sebanyak 10 kelompok. Jika dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2024, indikator ini memiliki penurunan sebesar 90,84% dengan jumlah realisasi di tahun tersebut sebanyak 131 kelompok. Realisasi yang telah dicapai IKU ini dapat melebihi target yang telah ditentukan. Artinya pada tahun ini, terdapat peningkatan kinerja penyuluh dalam memenuhi pencapaian target indikator pembentukan kelompok.

Terlampauinya capaian dari target yang telah ditetapkan serta terjadi nya kenaikan persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga dapat dikarenakan banyak potensi di wilayah binaan yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru serta kinerja penyuluh SATMINKAL BRPPUPP sangat baik sehingga dapat membentuk banyak kelompok baru di wilayah binaan penyuluh masing-masing.

Capaian Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	6	10	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	10	10	10

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian BRPPUPP telah melebihi target yang telah ditentukan. BRPPUPP termasuk Satminkal yang capaiannya lebih dari 100%, yaitu mencapai persentase 120%, begitu pula dengan satminkal lainnya capaian IKU ini sdh di atas 100%

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan

- b) **Monitoring** capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Puslatluh KP dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Puslatluh KP,
- c) **Pelaporan online** dokumen capaian kinerja Penyuluh Perikanan, dan SKP Penyuluh Perikanan beserta data dukungannya
- d) **Evaluasi** kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 695.701.000,25 dan telah terealisasi sebesar Rp 289.800.000 (41,65%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 78,35%.

Indikator Kinerja 4

Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)

Definisi dari IKU ini yaitu Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN

PMK 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP

Formula Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya dan/atau surat penyampaian realisasi PNBP dari Sekretariat BPPSDM KP

Tabel 10. Capaian IKU Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	0,01	0,01	0,01	0,03	120	120	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Untuk realisasi indikator kinerja PNBP capaian di triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,03 dengan target 0,01 dan persentase sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2023-2024, terjadi kenaikan sebesar 120% dimana capaian untuk IKU Nilai PNBP pada triwulan I tahun 2023-2024 adalah sebesar 0,01 dan untuk Tahun 2021-2022 belum terdapat Target IKU Nilai PNBP di Satker di BRPPUPP.

Nilai PNBP BRPPUPP yang didapat di triwulan I Tahun 2025 berasal dari Surat penyampaian Capaian PNBP dari BPPSDM Nomor: B.3216/BPPSDM.1/KU.340/IV/2025 per tanggal 14 April 2025 dengan rincian terlampir pada tabel berikut:

Tabel 11. Rincian PNBP dari Surat Penyampaian PNBP BPPSDM KP

CAPAIAN KINERJA PNBP SATKER BPPSDM
 TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN PNBP (RP)		
		PAGU	REALISASI	Persentase
BPPSDM		32.403.240.000	12.923.578.551	39.88%
SATUAN KERJA PNBP		14.250.179.000	4.339.682.688	30.45%
1	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	284.242.000	696.206.995	244.93%
2	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	474.390.000	109.331.532	23.05%
3	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	450.001.000	27.136.324	6.03%
4	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	818.828.000	429.694.495	52.48%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	783.175.000	111.975.715	14.30%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	188.600.000	65.107.333	34.52%
7	AK KP WAKATOBI	17.177.000	-	0.00%
8	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	49.426.000	257.532	0.52%
9	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	-	4.550.212	0.00%
10	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.025.000	52.894.242	96.13%
11	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	-	32.060.562	0.00%
12	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	41.274.000	26.807.569	64.95%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2.200.000	22.182.249	1008.28%
14	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	-	1.523.039	0.00%
15	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	552.000.000	45.098.051	8.17%
16	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	1.623.862.000	203.894.218	12.56%
17	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	92.800.000	17.920.456	19.31%
18	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	210.000.000	28.931.600	13.78%
19	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	408.640.000	131.822.730	32.26%
20	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	26.500.000	1.327.244	5.01%
21	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	-	2.726.045	0.00%
22	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	-	2.155.224	0.00%
23	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	543.951	0.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	239.929.000	44.966.210	18.74%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	165.334.000	4.880.605	2.95%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	385.000.000	371.159.236	96.40%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	104.000.000	44.519.450	42.81%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	366.025.000	10.276.957	2.81%
29	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	2.741.692.000	561.797.997	20.49%
30	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	105.464.000	6.564.858	6.22%
31	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	1.315.229.000	471.918.366	35.88%
32	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	-	4.524.588	0.00%
33	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	475.000.000	57.952.626	12.20%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	-	69.413.035	0.00%
35	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	454.385.000	442.879.814	97.47%
36	SEKRETARIAT BPPSDM	-	157.437.452	0.00%
37	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	255.074.000	43.914.630	17.22%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	700.907.000	13.082.439	1.87%
39	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	864.000.000	20.247.107	2.34%
SATUAN KERJA BLU		18.153.061.000	8.583.895.863	47.29%
40	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	7.812.371.000	6.770.691.019	86.67%
41	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	10.340.690.000	1.813.204.844	17.53%

Sumber: Surat BPPSDM Nomor: B.3216/BPPSDM.1/KU.340/IV/2025 per tanggal 14 April 2025

Salah satu faktor yang mendukung dan kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU PNBP sehingga dapat melebihi target yaitu :

- a) Kontribusi dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.
- b) Kontribusi dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya dari kegiatan SFV UPT Mariana dan Kegiatan di Instalasi Patra Tani.
- c) Kontribusi dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian Indikator kinerja ini antara lain adalah:

1. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPPUPP melalui: (a) monitoring pada aplikasi OMSPAN maupun SIMPONI, (b) laporan mingguan dan bulanan internal BRPPUPP, serta (c) Kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per Triwulan di internal BRPPUPP.
2. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP melalui kegiatan pengukuran capaian kinerja per triwulan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusluh KP.
3. Memasukkan ke dalam SKP pegawai terkait pelaporan nilai PNBP sebagai upaya monitoring capaian PNBP perbulan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Pengelolaan Sarana dan Prasarana riset perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 0 (0%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 120%.

Capaian IKU Nilai PNBP BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU Nilai PNBP Satker BRPPUPP dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	0,01	0,03	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0,15	0,2	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	0,01	0,02	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	0,02	0,05	120

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP dan satker lainnya memperoleh capaian di atas 100% yang artinya capaian untuk IKU ini seluruh telah melampaui target yang ditentukan.

Indikator Kinerja 5

Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit)

Definisi dari IKU ini yaitu Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Tabel 13. Capaian IKU Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang mendapatkan pendampingan di BRPPUPP (Unit)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	5	5	100	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari gabungan kelompok/koperasi/korporasi yang mendapatkan pendampingan oleh penyuluh kelautan dan perikanan. Berdasarkan tabel diatas pada triwulan I Tahun 2025 capaian indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu tercapai 5 unit dari target sebanyak 5 unit. IKU ini belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena baru terdapat di tahun 2025.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 695.701.000,25 dan telah terealisasi sebesar Rp 289.800.000 (41,65%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 58,35%.

Capaian IKU Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi BRPPUPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perbandingan Capaian IKU Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi BRPPUPP dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	5	5	100
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	2	3	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100

Sumber: LKj UPT

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BRPPUPP dan satker lainnya memperoleh capaian di 100% dan 120% yang artinya capaian untuk IKU ini seluruh telah mencapai target yang ditentukan.

SASARAN KEGIATAN 2 :

Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 6

Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)

Definisi dari IKU ini yaitu Media penyuluhan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha. Media penyuluhan terdiri atas media tercetak, media terdengar dan media tertayang. Media tercetak misalnya folder, leaflet, poster dan lainnya. Media terdengar antara lain naskah siaran radio. Media tertayang antara lain video, podcast dan lainnya. Formula perhitungan untuk iku ini sebagai berikut: Jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP sesuai binaannya

Tabel 15. Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Media penyuluhan dalam bentuk softcopy/file yang telah disusun oleh Satminkal sesuai kebutuhan pelaku usaha untuk digunakan Penyuluh Perikanan melakukan penyuluhan. Untuk pengukurannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025 dan IKU ini merupakan IKU baru di BRPPUPP.

SASARAN KEGIATAN 3 :

Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 7

Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)

Definisi dari IKU ini yaitu Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP. Formula perhitungan IKU ini yaitu Hitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh Assesment Center KKP

Tabel 16. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Data Penyuluh Perikanan PNS yang lulus penilaian Kompetensi by name by address beserta link Sertifikat/Surat Keterangan dari Biro SDMAO KKP. Untuk pengukurannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025 dan IKU ini merupakan IKU baru di BRPPUPP.

Indikator Kinerja 8

Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)

Definisi dari IKU ini yaitu Merupakan indikator yang menunjukkan presentase jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku.

Tabel 17. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Data Penyuluh kelautan dan Perikanan yang lulus Sertifikasi Pelatihan Teknis by name by address beserta link Sertifikat/Surat Keterangan dari Penyelenggara. Untuk pengukurannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025 dan IKU ini merupakan IKU baru di BRPPUPP.

SASARAN KEGIATAN 4 :

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 9

Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)

Definisi dari IKU ini yaitu Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan

tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker.

Tabel 18. Capaian IKU Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal, Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan dan Laporan kegiatan pelaksanaan. Untuk pengukurannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025 dan IKU ini merupakan IKU baru di BRPPUPP.

Indikator Kinerja 10

Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit).

Definisi dari IKU ini yaitu Peningkatan kapasitas Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker.

Tabel 19. Capaian IKU Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Jumlah Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal, Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan dan Laporan kegiatan pelaksanaan. Untuk pengukurannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025 dan IKU ini merupakan IKU baru di BRPPUPP.

SASARAN KEGIATAN 5 :

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 11

Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)

Definisi iku ini yaitu Jumlah dokumen kerja sama Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan antar lembaga dan internasional yang ditandatangani/ disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dasar Hukum:

- Dasar Hukum PerMenKP 65/2016 tentang pedoman KS dan penyusunan perjanjian di lingkungan KKP
- Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama Penyuluhan kelautan dan perikanan
- Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT
- Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama
- Ruang lingkup meliputi:
 - Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
 - Diseminasi dan publikasi
 - Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama
 - Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM

Tabel 20. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Kerjasama lingkup antar Lembaga dan internasional dan disepakati Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bersama para pihak kerja sama. Untuk pengukurannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025.

Indikator Kinerja 12

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%)

Definisi IKU ini yaitu Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sampai dengan waktu pengukuran. Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Surat penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP

Tabel 21. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	75	100	85	100	117,65	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada triwulan I Tahun 2025 ini capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPUPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) memiliki presentase capaian sebesar 100% yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan target 85.

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP mencapai target pada triwulan I tahun 2025 ini antara lain disebabkan oleh telah ditindaklanjutnya rekomendasi Itjen KKP oleh BRPPUPP yang termuat pada aplikasi SIDAK.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain :

- a) Rapat Monitoring Capaian Kinerja yang dilaksanakan BRPPUPP setiap triwulan
- b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusluh KP.

Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP (%) satker lingkup Pusluh triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Perbandingan Capaian Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	85	100	117,65
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	85	85	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	85	100	117,65
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	85	85	100

Sumber: LKj UPT

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa persentase capaian terhadap target indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPPUPP memiliki persentase capaian yang sama dengan BRPBATPP Bogor karena dilakukan sampling oleh Itjen KKP dan telah melakukan tindak lanjut secara keseluruhan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Anggaran yang mendukung IKK ini adalah SPIP dan Manajemen resiko dengan

anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0 (0%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 117,65% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 117,65%

Indikator Kinerja 13

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan:

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

• Nilai IKPA =
$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobor Indikator } n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 23. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (nilai)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan. Untuk pengukurannya akan dilakukan pada semester 1 dan akhir tahun 2025.

Indikator Kinerja 14

Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)

Definisi IKU ini yaitu Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung

berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Tabel 24. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Surat Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Pusluh KP dari Sekretariat BPPSDM KP. Untuk pengukurannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025.

Indikator Kinerja 15

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)

Definisi IKU ini adalah Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (P_{Penggunaan_{SBK}} \times W_{Penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Tabel 25. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya berasal dari Nota Dinas Sekretariat Jenderal. Untuk pengukurannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025.

Indikator Kinerja 16

Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)

Definisi IKU ini antara lain: Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$	$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$	$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m
Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP _i = Indeks Profesionalisme ke-i IP ₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP ₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP ₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP ₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin		

Tabel 26. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Pada Indikator Kinerja ini capaian kerjanya berasal dari Surat Penyampaian Hasil Nilai IP ASN dari Sekretariat BPPSDM KP. Untuk pengukurannya akan dilakukan pada semester 1 dan akhir tahun 2025.

Indikator Kinerja 17

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)

Definisi IKU ini adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungannya yaitu:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 27. Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)

Realisasi Triwulan I Tahun				Triwulan I Tahun 2025				RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80	100	120	-	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada triwulan I Tahun 2025 ini capaian indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) memiliki presentase capaian sebesar 100% yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan target 85.

Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 4.766.327.000 (58,84%) dengan pagu Rp 8.100.000.000,-. Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) mencapai target pada triwulan I tahun 2025 ini antara lain disebabkan oleh Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain :

- a) Pemantauan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja).
- b) Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPPUPP dengan Kepala Pusluh KP.

Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) satker lingkup Pusluh triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Perbandingan Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP dengan satminkal lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	85	100	120
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	85	100	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	85	100	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	85	100	120

Sumber: LKj UPT

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa persentase capaian terhadap target indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) memiliki persentase capaian yang sama dengan BRPBATPP Bogor, Maros dan Gondol sehingga capaiannya adalah sebesar 120%. Anggaran yang mendukung IKK ini adalah Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.100.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.766.327.000 (58,84%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 61,16%

Indikator Kinerja 18

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)

Definisi dari IKU ini yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Formula Perhitungan untuk IKU ini Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

Formula

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2025, DIPA BRPPUPP memiliki 2 (dua) program dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 75.788.129.000, yang terdiri dari Program Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan pagu awal Rp. 3.546.805.000 dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 72.241.324.000.

Sampai dengan Triwulan I TA 2025, telah dilakukan revisi terhadap DIPA BRPPUPP sebanyak 5 kali, yaitu :

1. Revisi 1 : Revisi pemutakhiran KPA (penyesuaian anggaran outsourcing)
2. Revisi 2 : Revisi blokir anggaran (efisiensi) revisi DJA
3. Revisi 3 – 4 : Revisi DJA (pergeseran blokir)
4. Revisi 5 : Revisi DJA (Relaksasi Blokir)

Penyerapan anggaran BRPPUPP sampai dengan 31 Maret 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29. Realisasi Anggaran BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025

KODE	OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI	%
7020	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		3,016,052,000	869,400,000	28.83
7020.DCC.436	Penyuluh perikanan yang bersertifikat kompetensi	14 Orang	14,000,000		-
7020.QDD.646	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh kelautan dan perikanan	4048 Kelompok Masyarakat	2,927,052,000	869,400,000	29.70
7020.RAL.716	Peralatan dan Mesin penyuluhan kelautan dan Perikanan	1 Unit	25,000,000		-
7020.RBQ.726	Gedung, Bangunan dan Prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	50,000,000		-
2378	Dukungan Manajemen internal Lingkup Badan Riset dan Sumbder Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		72,241,324,000	17,665,892,301	24.45
2378.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	11,000,000		-
2378.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	14,000,000		-
2378.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	32,000,000	8,000,742	25.00
2378.EBA.963	Layanan Data dan Infromasi	1 Layanan	6,000,000		-
2378.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	72,091,324,000	17,655,231,559	24.49
2378.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	16,000,000		-
2378.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	25,000,000		-
2378.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	21,000,000	2,660,000	12.67
2378.EBD.955	Layanan Majamen Keuanga	1 Dokumen	15,000,000		-
2378.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	10,000,000		-
TOTAL			75,257,376,000	18,535,292,301	24.63

Sumber : data realisasi, aplikasi SAKTI per tgl 31 Maret 2025

Tabel diatas merupakan data penyerapan anggaran BRPPUPP berdasarkan data realisasi dari aplikasi SAKTI dan pagu berdasarkan aplikasi OMSPAN. Dimana pada aplikasi SAKTI tidak

dicantumkan jumlah Pagu Blokir sebesar Rp. 530.753.000,- sehingga Pagu Revisi yang tercantum pada aplikasi SAKTI sebesar Rp. 75.257.376.000 dan realisasi sebesar Rp. 18.535.292.301 (24,63%).

Dalam mencapai target Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan di triwulan I tahun 2025, maka diperlukan alokasi anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan. Berikut adalah tabel realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan BRPPUPP di triwulan I Tahun 2025.

Tabel 30. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Per IKU

Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan Pendukung (Renja/Rkakl 2025)	Kode	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi TW I TAHUN 2025	%	Satuan Output	Target Output	Realisasi IKU TW I TAHUN 2025	% Capaian NPSS	Efisiensi	
S.1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			Rp. 2.787.805.000	Rp 1.159.200.000	41,58				109,33	67,75	
1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 695.701.000,25	Rp. 289.800.000	41,65	Kelompok	100	110	110	68,35
2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 695.701.000,25	Rp. 289.800.000	41,65	Kelompok	1	1	100	58,35
3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 695.701.000,25	Rp. 289.800.000	41,65	Kelompok	10	12	120	78,35
4	Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	Layanan BMN	2378.EBA.956.	Rp 5.000.000	-	-	Rupiah Milyar	0,01	0,03	120	120
5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit)	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	'7020.QDD.646.	Rp 695.701.000,25	Rp. 289.800.000	41,65	Unit	5	5	100	58,35
S. 2 Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			Rp 6.000.000	Rp -	-				-	-	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I - 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan Pendukung (Renja/Rkaki 2025)	Kode	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi TW I TAHUN 2025	%	Satuan Output	Target Output	Realisasi IKU TW I TAHUN 2025	% Capaian NPSS	Efisiensi
6	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	Pengelolaan Data dan Informasi Publik Penyuluhan KP	'2378.EBA.963	Rp 6.000.0000	Rp -	-	Paket	1	-	-
S. 3 Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			Rp 14.000.000	Rp -	-				-	-
7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	Penyuluh Perikanan yang bersertifikat Kompetensi	'7020.DCC.436	Rp 7.000.000	Rp -	-	Orang	14	-	-
8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	Penyuluh Perikanan yang bersertifikat Kompetensi	'7020.DCC.436	Rp 7.000.000	Rp -	-	Orang	10	-	-
S. 4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan			Rp 75.000.000	Rp						
9	Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)	Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7020.RAL.716.	Rp 25.000.000	Rp					
10	Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit)	Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	'7020.RBQ.726.	Rp 50.000.000						

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I - 2025

S. 5 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				Rp 72.230.324.000	Rp 23.395.155.000	32,38				118,83	86,45
Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan Pendukung (Renja/Rkaki 2025)	Kode	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi TW I TAHUN 2025	%	Satuan Output	Target Output	Realisasi IKU TW I TAHUN 2025	% Capaian NPSS	Efisiensi	
11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)	Pelayanan Publik dan Kehumasan Pelayanan Kerjasama	'2378.EBA.958.201.DA. 2378.EBA.958.201.DB	Rp 15.000.000	Rp -	-	Dokumen	1	-	-	-
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	SPIP dan Manajemen resiko	'2378.EBD.955.201.DB.	Rp 5.000.000	Rp -	-	%	85	100	117,65	117,65
13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyuluhan KP Layanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Penyuluhan KP Layanan Perkantoran	'2378.EBD.955.201.DA 2378.EBA.962.201.DA 2378.EBA.994.	Rp 64.038.324.000	Rp 18.626.168.000	29	Nilai	92	-	-	29
14	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	.Penyusunan Program dan Anggaran Penyuluhan KP	'2378.EBD.952.201.DA	Rp 20.000.000	Rp 2.660.000	13	Nilai	80	-	-	13
15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	Monev dan Capaian Kinerja	'2378.EBD.953.101.DA.	Rp 21.000.000	Rp -	-	Nilai	71,50	-	-	-
16	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	Layanan Manajemen SDM. Pelayanan Kearsipan	'2378.EBC.954 2378.EBD.974	Rp 26.000.000	Rp -	-	Indeks	81	-	-	-
17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	'2378.EBA.994.002.	Rp 8.100.000.000	Rp 4.766.327.000	58,84	%	80	100	120	61,16
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	.Layanan BMN	'2378.EBA.956	Rp 5.000.000	Rp -		%	80	-	-	-
				Rp 75.788.129.000	Rp 23.684.955.000	31,25				114,08	82,83

Sumber : aplikasi kinerjajaku dan OMSPAN Kementerian Keuangan

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP Triwulan I Tahun 2025

Efisiensi adalah cara untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud adalah waktu, tenaga (sumberdaya manusia) dan biaya (anggaran). Suatu pekerjaan dinilai efisien apabila sumber daya (input) yang digunakan sedikit, namun mampu menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan rencana atau harapan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi, data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa skor kinerja BRPPUPP triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 114,08%, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 31,25% Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut telah menghasilkan efisiensi sebesar 82,83% yang didapatkan dari selisih nilai pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah diserap untuk mencapai kinerja.

Kondisi ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

1. Terdapat beberapa output dengan pencapaian sama dengan atau lebih besar dari 100%, seperti:
 - A. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) dengan capaian di Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 110 Kelompok dengan target sebanyak 100 Kelompok dengan persentase sebesar 110%
 - B. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 1 kelompok dari target triwulan I tahun 2025 sebanyak 1 kelompok dengan persentase sebesar 100%.
 - C. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai 12 kelompok dari target triwulan I Tahun 2025 sebanyak 10 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
 - D. Nilai PNBPN Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar) tercapai 0,03 dari target triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,01 dengan persentase sebesar 120%.
 - E. Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit) tercapai sebanyak 5 Unit dengan target 5 Unit dan persentase sebesar 100%.

- F. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target sebesar 85% dengan persentase capaian 117,65%**
- G. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 80% dengan persentase capaian 120%**

BAB IV

PENUTUP

01

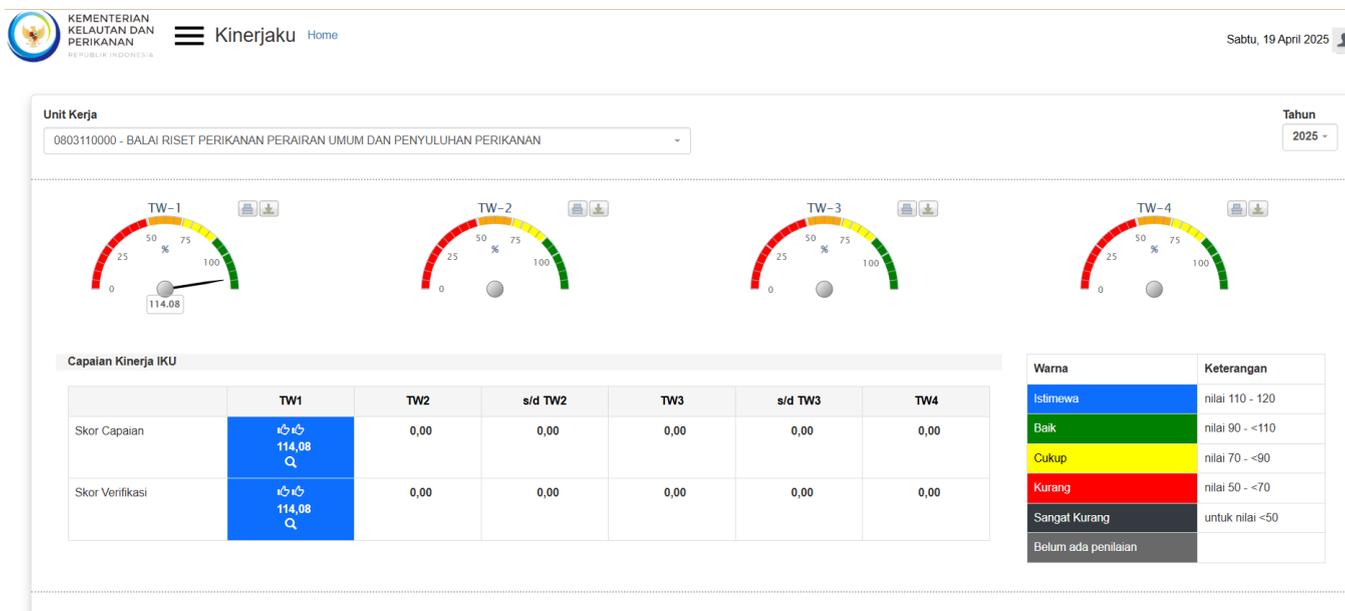
CAPAIAN KINERJA UTAMA

02

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2025 sebesar **114,08%**, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerja Triwulan I Tahun 2025 BRPPUPP

Pada Triwulan I tahun 2025 dari 18 IKU terdapat 7 IKU BRPPUPP yang telah mencapai target sehingga berstatus biru dan hijau, IKU yang telah ada capaiannya adalah:

1. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok) dengan capaian di Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 110 Kelompok dengan target sebanyak 100 Kelompok dengan persentase sebesar 110%
2. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai sebanyak 1 kelompok dari target triwulan I tahun 2025 sebanyak 1 kelompok dengan persentase sebesar 100%.
3. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok) tercapai 12 kelompok dari target triwulan I Tahun 2025 sebanyak 10 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
4. Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar) tercapai 0,03 dari target triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,01 dengan persentase sebesar 120%.

5. **Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit) tercapai sebanyak 5 Unit dengan target 5 Unit dan persentase sebesar 100%**
6. **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target sebesar 85% dengan persentase capaian 117,65%**
7. **Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%) tercapai sebesar 100% dengan target yaitu sebesar 80% dengan persentase capaian 120%**

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan yang terjadi pada triwulan I tahun 2025 yaitu:

1. Target IKU di triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sebanyak 7 IKU dengan persentase 100-120%.
2. Proses pencapaian IKU Kelompok yang ditingkatkan kelas cenderung membutuhkan waktu yang tidak singkat dan proses yang panjang karena melibatkan banyak pihak, sehingga Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Utama yang ditingkatkan pada triwulan I Tahun 2025 baru mendapatkan 1 kelompok dari target tahun 2025 sebanyak 149.

Secara umum Kinerja BRPPUPP pada triwulan I tahun 2025 berjalan dengan baik, namun demikian untuk memastikan capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal pada triwulan berikutnya perlu dilakukan beberapa rekomendasi antara lain:

1. Indikator kinerja dengan capaian lebih dari 100% agar tetap dipertahankan capaiannya dengan melakukan monitoring agar tidak terjadi penurunan pada tahun berikutnya.
2. Menginventarisir calon kelompok yang akan ditingkatkan serta pengembangan Kompetensi dan Mindset Kelompok supaya lebih mandiri

Laporan Kinerja triwulan I ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPPUPP. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPPUPP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkup BRPPUPP.

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah BRPPUPP ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



LAMPIRAN

Lampiran 1

PK BRPPUPP-PUSLUH KP 27 Januari 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**

Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan


Yayan Hikmayani


Rezki Antoni S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPPUPP (Kelompok)	4.048
		2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPPUPP (Kelompok)	149
		3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPPUPP (Kelompok)	453
		4	Nilai PNBP Satker BRPPUPP (Rupiah Milyar)	0,0412
		5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPPUPP (Unit)	28
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPPUPP (Paket)	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPPUPP (Orang)	14
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPPUPP (Orang)	10
4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan	9	Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan oleh BRPPUPP (Unit)	1
		10	Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya oleh BRPPUPP (Unit)	1
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPPUPP (Dokumen)	1
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPPUPP (%)	85
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	92
		14	Penilaian Mandiri SAKIP BRPPUPP (Nilai)	80
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPPUPP (Nilai)	71,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16 Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (Indeks)	81
		17 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPPUPP (%)	80
		18 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPPUPP (%)	80

Data Anggaran

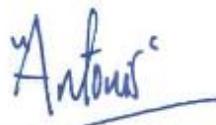
NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.546.805.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	72.241.324.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan		75.788.129.000

Jakarta, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan


Rezki Antoni S

Lampiran 2 SP tim Penyusun Pengelola Kinerja BRPPUPP Tahun 2025.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN

JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI NOMOR 08, JAKABARING-PALEMBANG
TELEPON: (0711) 5649600 FAKSIMILE (0711) 5469601
LAMAN: www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK persuratanbrppupp@kkp.go.id

SURAT PERINTAH
KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
NOMOR : B.134/BRPPUPP/TU.110/II/2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN KINERJA
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Institusi Pemerintah (SAKIP) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan tentang Tim Pengelolaan Kinerja di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694);

MEMBERI PERINTAH

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini;

KEDUA : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

Tim Pengelola Kinerja BRPPUPP Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;

b. Pelaksana

1. Ketua:

Memimpin Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi di lingkungan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;

2. Manajer Kinerja:

Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;

3. Sub-Tim Perencanaan Kinerja, memastikan bahwa:

a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat:

- 1) visi, misi, dan program;
- 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
- 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan; dan
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).

b. Indikator Kinerja:

- 1) Digunakan sebagai ukuran kinerja formal;

- 2) Indikator kinerja eselon III telah selaras dengan IKU Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Indikator kinerja memenuhi kriteria SMART- C; dan
 - 4) Ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
- c. Dokumen Kontrak Kinerja:
- 1) Perjanjian Kinerja (PK):
 - a) Tersusun selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
 - b) memuat target kinerja, digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - c) dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) Peta Strategis;
 - 3) Rincian Target IKU secara bulanan/triwulan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; dan
 - 4) Inisiatif Strategis/Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.
- d. Rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
- e. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada Balai Riset Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
4. Sub-Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/Verifikasi:
- a. Menyusun pedoman/mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan);
 - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - d. Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan);

- f. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - h. Memastikan LKj yang telah disusun, disampaikan tepat waktu dan diunggah ke dalam laman resmi;
 - i. Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - j. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - k. Menyusun laporan nilai evaluasi kinerja yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - l. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;
 - n. Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - o. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
 - p. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
 - q. Melakukan verifikasi data, informasi dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
 - r. Memastikan seluruh rekaman data, informasi dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan terdokumentasi dengan baik; dan
 - s. Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
5. Sub-Tim Kinerja Pegawai:
- a. Menyelaraskan indikator kinerja pegawai dengan indikator kinerja organisasi;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang telah menggambarkan hubungan antara kinerja organisasi dengan sasaran kinerja pegawai;

- c. Memastikan adanya integrasi sistem pengelolaan kinerja pegawai dengan sistem pengelolaan kinerja organisasi;
- d. Memastikan penerapan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) berbasis kinerja pada setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Mengkoordinasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang dan berkala di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

- KETIGA** : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan narasumber/pakar/praktisi/tenaga ahli/konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT** : Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Penyuluhan KP;
- KELIMA** : Masa kerja Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada Tanggal, 10 Januari 2025
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan



Antoni
Rezki Antoni S, S.Kel
NIP. 19850619 201012 1 001

Lampiran : Surat Perintah Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
 Nomor : B.134/BRPPUPP/TU.110/I/2025
 Tanggal : 10 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KINERJA
 BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
 DAN PENYULUHAN PERIKANAN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Pengarah : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
 Penanggung Jawab :

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
Manajer Teknis		
1.	Rezki Antoni S	Manajer
2.	Rully Ismanto	Manajer
3.	Sri Mulyani	Manajer
Sub Tim Perencanaan Kinerja		
1.	Acim Tirtana	Perencana
2.	Lisnawati	Perencana
3	Rian Ariadi Harahap	Perencana
Sub Tim Pengukuran Kinerja/Pelaporan Kinerja/Evaluasi Kinerja/Verifikasi		
1.	Muthia Nurlestari Putri	Pelaksana
2.	Arismansyah	Pelaksana

Ditetapkan di Palembang
 Pada Tanggal, 10 Januari 2025
 Kepala Balai Riset Perikanan
 Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan



Rezki Antoni S
 Rezki Antoni S. S, Kel
 NIP. 19850619 201012 1 001

Terima kasih

BRPPUPP PALEMBANG



(0711) 5649600



www.kkp.go.id/brsdm/brppupalembang



persuratanbrppupp@gmail.com



[bppsdm_brppupp.palembang](https://www.instagram.com/bppsdm_brppupp.palembang)

